
Pengaruh PDRB, Pajak, dan Retribusi Sektor Industri terhadap Tingkat Pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika

Pritty Ialuhun¹, Nur Khalimatus Sadia ², Rulan L. Manduapessy³

¹²³ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Jembatan Bulan; Indonesia

Correspondence e-mail*, annura.nazwa1@gmail.com

Submitted:2025/12/05

Revised: 2025/12/15;

Accepted: 2025/12/20;

Published: 2025/12/30

Abstract

This study aims to analyze the effect of industrial sector development on economic development in Mimika Regency. Economic development in this study is reflected through two main indicators, namely the unemployment rate and the Human Development Index (HDI). The research employs a quantitative associative approach using secondary time-series data obtained from the Central Bureau of Statistics for the period 2014–2023. The analytical method applied is the Autoregressive Distributed Lag (ARDL) model, which allows the examination of both short-run and long-run relationships among variables. The results indicate that the Gross Regional Domestic Product (GRDP) of the industrial sector in the current period has a significant effect on the unemployment rate, while industrial sector taxes show no significant effect. Industrial sector retribution in the current period is found to significantly affect unemployment. However, the findings reveal that industrial sector GRDP, taxes, and retribution do not have a significant impact on the HDI, either in the current or previous periods. These results suggest that while industrial development contributes to employment absorption, its role in improving human development outcomes in Mimika Regency remains limited

Keywords

Industrial Sector, GRDP, Unemployment, Human Development Index, ARDL



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

PENDAHULUAN

Pembangunan industri merupakan salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu daerah. Kabupaten Mimika sebagai bagian dari Provinsi Papua Tengah memiliki potensi sumber daya alam yang besar, khususnya pada sektor pertambangan dan industri pengolahan. Keberadaan sektor industri diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi daerah, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar luar negeri, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan industri. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor industri secara bertahap juga berpotensi mempercepat transformasi struktur ekonomi ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan.

Pembangunan industri tidak hanya berorientasi pada peningkatan output ekonomi, tetapi

juga pada perluasan kesempatan kerja dan pemerataan hasil pembangunan. Pertumbuhan sektor industri diyakini mampu memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, serta mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Dengan demikian, pembangunan industri memiliki peran strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan (Muttaqiyatin & Prakoso B. S. Eko, 2017:2).

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, industri didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, barang setengah jadi, atau barang jadi menjadi barang dengan nilai guna yang lebih tinggi, termasuk kegiatan perancangan dan rekayasa industri. Dari perspektif pembangunan, sektor industri dipandang sebagai sistem yang melibatkan unsur fisik, teknologi, serta sumber daya manusia. Pembangunan industri merupakan proses peningkatan kapasitas produksi melalui penguatan teknologi, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai. Secara teoritis, sektor industri berfungsi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi karena mampu menciptakan nilai tambah, meningkatkan produktivitas, dan mendorong ekspansi kegiatan ekonomi lainnya.

Salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), yang mencerminkan kemampuan suatu perekonomian dalam menyediakan lapangan kerja bagi penduduk usia kerja. Todaro (2000) menyatakan bahwa sebagian besar pengangguran berasal dari kelompok masyarakat miskin yang tidak memiliki akses terhadap pekerjaan tetap atau berkelanjutan. Seiring dengan meningkatnya jumlah angkatan kerja setiap tahun, persoalan pengangguran menjadi tantangan serius, terutama di daerah yang pertumbuhan industrinya bersifat padat modal dan tidak sepenuhnya menyerap tenaga kerja lokal.

Di Kabupaten Mimika, pesatnya perkembangan sektor industri dan pertambangan telah menarik masuk tenaga kerja dari luar daerah, sehingga meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja. Kondisi ini tidak selalu diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal secara optimal, terutama akibat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri (skill mismatch). Dominasi industri padat modal menyebabkan pertumbuhan kesempatan kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga tingkat pengangguran masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah. Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi permasalahan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana perkembangan sektor industri memengaruhi dinamika pasar tenaga kerja di Kabupaten

Mimika.

Selain tingkat pengangguran, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. IPM digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat, tingkat pendidikan, serta standar hidup yang layak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), IPM mencerminkan hasil akhir dari proses pembangunan manusia dan memiliki peran strategis dalam perencanaan serta evaluasi kebijakan pembangunan wilayah. Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik kualitas hidup masyarakat dan semakin rendah tingkat kemiskinan di suatu daerah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Mimika, tingkat pengangguran pada periode 2019–2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 2019, tingkat pengangguran tercatat sebesar 7,51 persen dan meningkat menjadi 7,80 persen pada tahun 2020. Namun, sejak tahun 2021 hingga 2023, tingkat pengangguran menurun dan stabil pada angka 5,37 persen. Sementara itu, IPM Kabupaten Mimika menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 70,40 pada tahun 2019 menjadi 73,15 pada tahun 2023, yang mengindikasikan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya urgensi untuk memahami sejauh mana pembangunan sektor industri benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam menurunkan tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Secara teoritis, peningkatan aktivitas industri yang tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor industri, pajak sektor industri, dan retribusi sektor industri diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja serta peningkatan pendapatan daerah.

Sejumlah penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara pembangunan industri dan pembangunan ekonomi. Mahroji dan Anwar (2020) menemukan bahwa PDRB berpengaruh terhadap tingkat pengangguran, sementara penelitian lain menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah dapat memengaruhi pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan daerah. Hasil penelitian tersebut tidak selalu konsisten pada setiap wilayah, karena perbedaan struktur ekonomi daerah, karakteristik sektor industri, serta kebijakan pengelolaan pendapatan daerah. Masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) terkait bagaimana kontribusi PDRB sektor industri, pajak sektor industri, dan retribusi sektor industri memengaruhi tingkat pengangguran serta Indeks Pembangunan Manusia, khususnya di daerah

dengan karakteristik industri berbasis sumber daya alam seperti Kabupaten Mimika.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pembangunan sektor industri terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika melalui indikator tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia. Dengan demikian, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah PDRB sektor industri, pajak sektor industri, dan retribusi sektor industri berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika?, apakah PDRB sektor industri, pajak sektor industri, dan retribusi sektor industri berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika?.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut: H1: PDRB sektor industri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika. H2: Pajak sektor industri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika. H3: Retribusi sektor industri berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika. H4: PDRB sektor industri berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika. H5: Pajak sektor industri berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika. H6: Retribusi sektor industri berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Mimika.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif, yang bertujuan untuk menganalisis hubungan dan pengaruh antara pembangunan sektor industri terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika. Penelitian asosiatif digunakan karena penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga menguji hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi: PDRB sektor industri (X1), Pajak sektor industri (X2), dan Retribusi sektor industri (X3). Sedangkan variabel dependen meliputi: Tingkat Pengangguran Terbuka (Y1), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Y2). Data yang digunakan merupakan data sekunder berbentuk time series periode 2014–2023 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika dan instansi terkait lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Autoregressive Distributed Lag (ARDL). Model ARDL dipilih karena mampu mengestimasi hubungan jangka pendek dan jangka

panjang secara simultan serta dapat digunakan pada data dengan tingkat integrasi campuran I(0) dan I(1), sebagaimana hasil uji stasioneritas dalam penelitian ini. Secara umum, model persamaan ARDL yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

Model 1 (Pengangguran):

$$Y1_t = \alpha_0 + \sum \alpha_i Y1_{t-i} + \sum \beta_i X1_{t-i} + \sum \gamma_i X2_{t-i} + \sum \delta_i X3_{t-i} + \varepsilon_t$$

Model 2 (IPM):

$$Y2_t = \alpha_0 + \sum \alpha_i Y2_{t-i} + \sum \beta_i X1_{t-i} + \sum \gamma_i X2_{t-i} + \sum \delta_i X3_{t-i} + \varepsilon_t$$

Keterangan:

Y1 = Tingkat Pengangguran

Y2 = Indeks Pembangunan Manusia

X1 = PDRB sektor industri

X2 = Pajak sektor industri

X3 = Retribusi sektor industri

ε_t = Error term

t-i = Lag ke-i

Pemilihan model ARDL dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa pertimbangan metodologis: data penelitian berbentuk time series dengan jumlah observasi relatif kecil (10 tahun). Hasil uji stasioneritas menunjukkan bahwa variabel memiliki tingkat integrasi campuran, yaitu I(0) dan I(1). Model ARDL mampu menguji hubungan jangka pendek dan jangka panjang secara simultan melalui pendekatan Bounds Test. Model ini lebih fleksibel dibandingkan metode kointegrasi lainnya seperti Johansen yang mensyaratkan seluruh variabel harus terintegrasi pada orde yang sama.

Uji normalitas dilakukan menggunakan uji Jarque-Bera untuk mengetahui apakah residual terdistribusi normal. Model dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila nilai probabilitas lebih besar dari $\alpha = 0,05$. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi tinggi antar variabel independen. Pengujian dilakukan melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF). Model dinyatakan bebas multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$. Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengambilan keputusan: jika nilai Probabilitas $F < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima (berpengaruh signifikan), jika nilai Probabilitas $F > 0,05$ maka H_0 diterima. Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara

parsial. Kriteria pengambilan keputusan jika nilai Probabilitas $< 0,05$ maka variabel berpengaruh signifikan, jika nilai Probabilitas $> 0,05$ maka variabel tidak berpengaruh signifikan. Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 1, maka semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh variabel penelitian berada dalam kondisi stasioner sebelum dilakukan estimasi model ARDL. Pengujian ini bertujuan untuk menghindari hasil estimasi yang bersifat bias akibat adanya akar unit pada data. Hasil uji stasioneritas seluruh variabel disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1
Hasil Uji Stasioneritas

No	Variabel	Probabilitas	Tingkat Stasioner	Keterangan
1	PDRB Sektor Industri (X1)	0,0000	Level	Stasioner I(0)
2	Pajak Sektor Industri (X2)	0,0009	Level	Stasioner I(0)
3	Retribusi Sektor Industri (X3)	0,0499	First Difference	Stasioner I(1)
4	Tingkat Pengangguran (Y1)	0,0146	First Difference	Stasioner I(1)
5	IPM (Y2)	0,0003	First Difference	Stasioner I(1)

Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel PDRB sektor industri (X1) dan pajak sektor industri (X2) stasioner pada level atau I(0), sedangkan retribusi sektor industri (X3), tingkat pengangguran (Y1), dan IPM (Y2) stasioner pada first difference atau I(1). Karena tidak terdapat variabel yang terintegrasi pada orde I(2), maka model ARDL dapat digunakan.

2. Uji Kointegrasi (Bounds Test)

Uji kointegrasi dilakukan menggunakan metode Bounds Test untuk mengetahui keberadaan

hubungan jangka panjang antarvariabel dalam model penelitian. Hasil pengujian kointegrasi untuk variabel Tingkat Pengangguran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2
Hasil Uji Kointegrasi Tingkat Pengangguran (Y1)

F-Statistic	I(0) 1%	I(1) 1%	I(0) 5%	I(1) 5%	I(0) 10%	I(1) 10%
369,96063	2,67	3,58	3,27	4,30	4,61	5,96

Hasil uji kointegrasi untuk variabel IPM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3
Hasil Uji Kointegrasi IPM (Y2)

F-Statistic	I(0) 1%	I(1) 1%	I(0) 5%	I(1) 5%	I(0) 10%	I(1) 10%
30,749643	2,67	3,58	3,27	4,30	4,61	5,96

Hasil Bounds Test menunjukkan nilai F-statistic untuk model pengangguran sebesar **369,96063**, sedangkan untuk model IPM sebesar **30,749643**. Nilai tersebut lebih besar dari nilai kritis I(1) pada tingkat signifikansi 1%, 5%, maupun 10%. Artinya, terdapat hubungan jangka panjang (kointegrasi) antara variabel PDRB, pajak, dan retribusi sektor industri terhadap tingkat pengangguran dan IPM di Kabupaten Mimika.

3. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual dalam model terdistribusi secara normal. Hasil pengujian normalitas untuk masing-masing variabel dependen disajikan sebagai berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Tingkat Pengangguran (Y1)

Jarque-Bera	Probabilitas
0,514487	0,773180

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas IPM (Y2)

Jarque-Bera	Probabilitas
1,462998	0,481187

Nilai probabilitas Jarque-Bera untuk model pengangguran sebesar 0,773180 dan model IPM sebesar 0,481187 ($> 0,05$). Artinya, residual terdistribusi normal.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui adanya ketidaksamaan varians error dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan metode Breusch–Pagan Godfrey. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas Tingkat Pengangguran (Y1)

Obs R-Squared	Probabilitas Chi-Square
7,522593	1,0000

Tabel 7
Hasil Uji Heteroskedastisitas IPM (Y2)

Obs R-Squared	Probabilitas Chi-Square
7,762612	1,0000

Probabilitas Chi-Square untuk kedua model sebesar 1,0000 ($> 0,05$). Artinya, tidak terdapat heteroskedastisitas.

5. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui adanya korelasi antar residual dalam model regresi. Pengujian dilakukan menggunakan Breusch–Godfrey Serial Correlation LM Test. Hasil pengujian disajikan sebagai berikut.

Tabel 8

Hasil Uji Autokorelasi Tingkat Pengangguran (Y1)

Obs R-Squared	Probabilitas Chi-Square
3,425945	0,1803

Tabel 9

Hasil Uji Autokorelasi IPM (Y2)

Obs R-Squared	Probabilitas Chi-Square
0,955933	0,6200

Probabilitas Chi-Square model pengangguran sebesar **0,1803** dan model IPM sebesar 0,6200 (> 0,05). Artinya, tidak terdapat autokorelasi. Model regresi memenuhi asumsi BLUE (Best Linear Unbiased Estimator).

6. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 10

Hasil Uji Simultan Tingkat Pengangguran (Y1)

Probabilitas	$\alpha = 5\%$
0,016722	0,05

Tabel 11

Hasil Uji Simultan IPM (Y2)

Probabilitas	$\alpha = 5\%$
0,199444	0,05

7. Uji Parsial (Uji t)

Uji parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut.

Tabel 12
Hasil Uji Parsial Tingkat Pengangguran (Y1)

Variabel	Probabilitas	$\alpha = 5\%$	Keputusan
Y1(-1)	0,0887	0,05	Tidak Signifikan
X1	0,0170	0,05	Signifikan
X1(-1)	0,2058	0,05	Tidak Signifikan
X2	0,6521	0,05	Tidak Signifikan
X2(-1)	0,9367	0,05	Tidak Signifikan
X3	0,0192	0,05	Signifikan
X3(-1)	0,0185	0,05	Signifikan

Tabel 13
Hasil Uji Parsial IPM (Y2)

Variabel	Probabilitas	$\alpha = 5\%$	Keputusan
Y2(-1)	0,1730	0,05	Tidak Signifikan
X1	0,1603	0,05	Tidak Signifikan
X1(-1)	0,1593	0,05	Tidak Signifikan
X2	0,1774	0,05	Tidak Signifikan
X2(-1)	0,1865	0,05	Tidak Signifikan
X3	0,1913	0,05	Tidak Signifikan
X3(-1)	0,1937	0,05	Tidak Signifikan

8. Hasil Estimasi Regresi ARDL

Tabel 14
Model 1: Pengangguran (Y1)

Variabel	Probabilitas	Keterangan
X1 (PDRB Industri)	0,0170	Signifikan
X2 (Pajak Industri)	0,6521	Tidak signifikan
X3 (Retribusi Industri)	0,0192	Signifikan
F-statistik (Prob)	0,016722	Signifikan

PDRB sektor industri berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Pajak sektor industri tidak berpengaruh signifikan. Retribusi sektor industri berpengaruh signifikan. Secara simultan, variabel independen berpengaruh terhadap pengangguran.

Tabel 15
Model 2: IPM (Y2)

Variabel	Probabilitas	Keterangan
X1 (PDRB Industri)	0,1603	Tidak signifikan
X2 (Pajak Industri)	0,1774	Tidak signifikan
X3 (Retribusi Industri)	0,1913	Tidak signifikan
F-statistik (Prob)	0,199444	Tidak signifikan

Secara parsial maupun simultan, PDRB, pajak, dan retribusi sektor industri tidak berpengaruh terhadap IPM.

Pembahasan

1. Pengaruh PDRB Sektor Industri terhadap Tingkat Pengangguran

Berdasarkan hasil uji t, diketahui bahwa variabel PDRB sektor industri pada periode berjalan (X1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PDRB sektor industri mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor tersebut sehingga berdampak pada penurunan tingkat pengangguran. Sebaliknya, PDRB sektor industri pada periode sebelumnya (X1(-1)) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, yang mengindikasikan bahwa dampak PDRB sektor industri terhadap pengangguran lebih bersifat langsung pada periode yang bersangkutan.

Di Kabupaten Mimika, peningkatan PDRB sektor industri pada tahun berjalan mampu menurunkan tingkat pengangguran secara relatif cepat karena secara langsung mendorong pembukaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor pengolahan sumber daya alam. Namun demikian, pengaruh tersebut cenderung bersifat jangka pendek karena pertumbuhan industri pada tahun sebelumnya tidak lagi memberikan dampak yang signifikan, seiring dengan kondisi lapangan kerja yang mulai stabil serta karakteristik sektor industri yang sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan proyek yang sedang berjalan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Mahroji dan Anwar (2020) yang menganalisis pengaruh PDRB di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian tersebut menemukan bahwa PDRB

berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, yang menunjukkan adanya fenomena *jobless growth*, yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi tidak selalu diikuti dengan penurunan tingkat pengangguran.

Pengaruh tersebut hanya signifikan pada periode berjalan, sehingga menunjukkan bahwa struktur industri Mimika cenderung bersifat ekstraktif dan berbasis proyek. Industri pertambangan dan pengolahan mineral di Mimika lebih bersifat padat modal (*capital intensive*) dibandingkan padat karya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan fenomena *jobless growth*, sebagaimana dijelaskan dalam teori pertumbuhan ekonomi modern, di mana pertumbuhan output tidak sepenuhnya diikuti peningkatan kesempatan kerja dalam jangka panjang.

2. Pengaruh Pajak Sektor Industri terhadap Tingkat Pengangguran

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pajak sektor industri (X_2), baik pada periode berjalan maupun pada periode sebelumnya ($X_2(-1)$), tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan atau besarnya pajak sektor industri tidak secara langsung memengaruhi kemampuan sektor industri dalam menyerap tenaga kerja.

Di Kabupaten Mimika, pajak sektor industri yang berlaku pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya tidak menunjukkan pengaruh yang nyata terhadap tingkat pengangguran. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan industri tidak secara langsung menentukan jumlah tenaga kerja yang diserap. Kondisi tersebut dapat terjadi karena perusahaan industri di Mimika, khususnya yang bergerak di sektor pertambangan dan pengolahan mineral, tetap beroperasi berdasarkan kebutuhan produksi dan permintaan pasar, sehingga keputusan perekrutan tenaga kerja lebih dipengaruhi oleh faktor operasional dan kondisi ekonomi dibandingkan oleh beban pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mahroji dan Anwar (2020) yang menganalisis pengaruh sektor industri manufaktur terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa PDRB sektor industri manufaktur memiliki pengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sementara terhadap retribusi daerah berpengaruh positif tetapi juga tidak signifikan. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan output industri manufaktur tidak selalu diikuti dengan peningkatan penerimaan pajak daerah, yang dapat disebabkan oleh adanya insentif fiskal atau struktur perpajakan yang belum optimal dalam menangkap aktivitas industri.

3. Pengaruh Retribusi Sektor Industri terhadap Tingkat Pengangguran

Berdasarkan hasil uji t, variabel retribusi sektor industri pada periode berjalan (X3) terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika. Temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan retribusi sektor industri memiliki peran penting dalam memengaruhi kinerja sektor industri yang berdampak pada penyerapan tenaga kerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi sektor industri pada tahun berjalan secara nyata memengaruhi tingkat pengangguran. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan retribusi yang diterapkan oleh pemerintah daerah dapat secara langsung memengaruhi aktivitas sektor industri. Apabila retribusi dikelola secara tepat, sektor industri dapat berkembang dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Sebaliknya, apabila retribusi bersifat terlalu membebani, kondisi tersebut dapat menghambat aktivitas usaha dan berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran di Indonesia. Penelitian tersebut menyatakan bahwa peningkatan penerimaan retribusi daerah dapat mendorong penurunan tingkat pengangguran, yang mengindikasikan bahwa kebijakan retribusi dapat berperan dalam mendukung penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat bukti empiris bahwa retribusi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga memiliki peran strategis dalam dinamika pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam memengaruhi penyerapan tenaga kerja.

4. Pengaruh PDRB Sektor Industri terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil analisis uji t, variabel PDRB sektor industri pada periode berjalan (X1) tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan output sektor industri dalam jangka pendek belum tentu secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam IPM. Selain itu, PDRB sektor industri pada periode sebelumnya (X1(-1)) juga tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, sehingga dampak pertumbuhan sektor industri terhadap pembangunan manusia belum terlihat secara nyata.

Kondisi di Kabupaten Mimika menunjukkan bahwa pertumbuhan PDRB sektor industri, baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, belum memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan IPM. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sektor industri berkembang dan

menghasilkan output yang besar, manfaatnya belum secara langsung dirasakan oleh masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas hidup, seperti perbaikan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mardiana et al. (2018). Perbedaan hasil antara penelitian ini dan penelitian tersebut dapat disebabkan oleh perbedaan struktur ekonomi daerah, jenis sektor industri yang dominan, serta mekanisme pemanfaatan penerimaan daerah yang berasal dari sektor industri. Dengan demikian, meskipun secara teoritis peningkatan PDRB diharapkan mampu meningkatkan IPM, dalam konteks wilayah dan periode penelitian ini, peningkatan PDRB sektor industri beserta penerimaan pajak dan retribusinya belum mampu memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

5. Pengaruh Pajak Sektor Industri terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil analisis uji t, diketahui bahwa variabel pajak sektor industri (X_2), baik pada periode berjalan maupun periode sebelumnya ($X_2(-1)$), tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap IPM di Kabupaten Mimika. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penerimaan pajak sektor industri yang belum dimanfaatkan secara optimal untuk pembiayaan pembangunan manusia, seperti pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak sektor industri, baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, belum memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan IPM. Hal ini mengindikasikan bahwa penerimaan pajak dari sektor industri belum sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pembangunan manusia, sehingga kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat belum dirasakan secara langsung.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sary dan Rochmatullah (2023) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan IPM di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah pada periode 2017–2021. Perbedaan hasil tersebut diduga disebabkan oleh perbedaan karakteristik ekonomi daerah, perbedaan objek penelitian, perbedaan periode penelitian, serta perbedaan mekanisme pengalokasian pendapatan daerah dalam mendukung program pembangunan manusia.

6. Pengaruh Retribusi Sektor Industri terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Berdasarkan hasil analisis uji t, diketahui bahwa variabel retribusi sektor industri (X_3), baik pada periode berjalan maupun periode sebelumnya ($X_3(-1)$), tidak menunjukkan pengaruh yang

signifikan terhadap IPM di Kabupaten Mimika. Temuan ini mengindikasikan bahwa penerimaan retribusi sektor industri belum secara langsung diarahkan untuk mendukung peningkatan layanan publik yang memengaruhi IPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa retribusi sektor industri, baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya, belum memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan IPM di Kabupaten Mimika. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang dapat mendorong peningkatan kualitas hidup.

Hasil penelitian ini konsisten dengan temuan penelitian yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap IPM, melainkan berpengaruh secara tidak langsung melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Temuan tersebut sejalan dengan kondisi di Kabupaten Mimika, di mana retribusi sektor industri belum secara khusus dialokasikan untuk pembiayaan layanan publik yang berorientasi pada peningkatan IPM.

Tidak signifikannya pajak industri terhadap pengangguran menunjukkan bahwa keputusan perusahaan dalam menyerap tenaga kerja tidak ditentukan oleh besarnya beban pajak, melainkan oleh: harga komoditas global, skala produksi, investasi teknologi, efisiensi operasional. Struktur industri Mimika yang berbasis pertambangan besar membuat pajak menjadi komponen biaya yang relatif kecil dibandingkan nilai produksi. Adanya insentif fiskal dan regulasi pusat juga dapat meminimalkan pengaruh pajak daerah terhadap struktur ketenagakerjaan.

Temuan paling penting dalam penelitian ini adalah bahwa seluruh variabel industri tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Hal ini mengindikasikan kemungkinan terjadinya: Kegagalan Trickle-Down Effect, Menurut teori trickle-down, pertumbuhan ekonomi akan menetes ke bawah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di Mimika, pertumbuhan industri belum sepenuhnya mengalir ke sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan daya beli masyarakat lokal.

Juga Pertumbuhan yang Belum Inklusif, konsep inclusive growth menekankan bahwa pertumbuhan harus disertai pemerataan manfaat. Struktur industri Mimika yang ekstraktif dan padat modal menyebabkan manfaat ekonomi lebih terkonsentrasi pada: perusahaan besar, tenaga kerja terampil dari luar daerah, investor. Sehingga dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat lokal relatif terbatas.

Karakteristik industri di Kabupaten Mimika didominasi oleh sektor pertambangan dan

pengolahan mineral yang: berorientasi ekspor, menggunakan teknologi tinggi, membutuhkan tenaga kerja terampil, bersifat capital intensive. Struktur seperti ini secara teoritis memiliki multiplier effect yang lebih kecil terhadap pembangunan manusia dibandingkan industri manufaktur padat karya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Mahroji & Anwar (2020) yang menemukan adanya fenomena jobless growth. Juga konsisten dengan Mardiana et al. (2018) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu berdampak langsung pada IPM. Berbeda dengan Sary & Rochmatullah (2023) yang menemukan pajak dan retribusi berpengaruh terhadap IPM di Jawa Tengah. Perbedaan ini dapat dijelaskan oleh perbedaan struktur ekonomi daerah, dominasi sektor industri, kebijakan pengalokasian pendapatan daerah, tingkat diversifikasi ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan sektor industri di Kabupaten Mimika menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap tingkat pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). PDRB sektor industri pada periode berjalan terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran, sedangkan pajak sektor industri tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan, dan retribusi sektor industri pada periode berjalan memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran. Sementara itu, terhadap IPM, seluruh variabel pembangunan industri yang meliputi PDRB, pajak, dan retribusi sektor industri, baik pada periode berjalan maupun periode sebelumnya, tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun sektor industri berperan dalam menyerap tenaga kerja, dampaknya terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dalam IPM belum dirasakan secara langsung, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam menghubungkan pertumbuhan sektor industri dengan pembangunan manusia di Kabupaten Mimika.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah: 1) Mendorong industrialisasi yang lebih padat karya, khususnya pada sektor hilirisasi dan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal, agar penyerapan tenaga kerja masyarakat setempat lebih optimal. 2) Mengoptimalkan alokasi penerimaan pajak dan retribusi sektor industri untuk pembiayaan program pembangunan manusia, seperti peningkatan kualitas pendidikan vokasi, pelatihan keterampilan tenaga kerja lokal, dan layanan kesehatan. 3) Meningkatkan linkage effect antara industri besar dan UMKM lokal, sehingga manfaat

pertumbuhan industri dapat menyebar lebih luas melalui efek pengganda (multiplier effect). 5) Memperkuat kebijakan pengembangan sumber daya manusia lokal, guna mengurangi ketimpangan keterampilan (skill mismatch) antara kebutuhan industri dan tenaga kerja daerah. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada jumlah observasi yang relatif kecil (periode 2014–2023), keterbatasan variabel yang hanya mencakup PDRB, pajak, dan retribusi sektor industri, serta penggunaan pendekatan kuantitatif time series yang belum menggali aspek kualitatif seperti struktur industri dan distribusi pendapatan. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti investasi dan belanja pemerintah, menggunakan periode yang lebih panjang atau pendekatan panel data, serta mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis pertumbuhan inklusif dan efektivitas kebijakan fiskal daerah secara lebih komprehensif.

REFERENSI

- Agustina, S., & Hadi, S. (2021). Analisis faktor yang mempengaruhi produk domestik regional bruto di Provinsi Jawa Barat tahun 2015–2019. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 5(4), 690–700. <https://doi.org/10.22219/jie.v5i04.17826>
- Ananda, R. (2016). Peran home industry dalam meningkatkan ekonomi keluarga (Studi kasus home industry keripik di Kelurahan Kubu Gadang). *JPM FISIP (Jurnal Pengabdian Masyarakat)*, 3(2), 1–15.
- Budiani, S. R., Santi, D. I., Rokhim, A. A., Puspaningrani, F. C., Kurniasari, K., Probowati, H., Ramdani, H. P., Rafif, M., & Hilmi, Z. (2022). Analisis hubungan sektor unggulan industri pengolahan dengan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kendal tahun 2010–2019. *Majalah Geografi Indonesia*, 36(1), 10. <https://doi.org/10.22146/mgi.63158>
- Butarbutar, G. R. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan usaha industri makanan khas di Kota Tebing Tinggi. *JOM Fekon*, 4(1), 619–633.
- Fangohoi, U., & Sandy, S. (2020). Analisis potensi penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi taksi gelap di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 4, 1–15.
- Faudzi, M., & Asmara, G. D. (2023). Analisis neraca perdagangan Indonesia: Pendekatan ARDL. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.47134/jmsd.v1i1.17>
- Fitriana, A. N., Noor, I., & Hayat, A. (2014). Pengembangan industri kreatif di Kota Batu (Studi tentang industri kreatif sektor kerajinan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 2(2), 281–286.
- Hasibuan, J. S. (2015). Analisis kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kota Medan. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 3(1), 53–61.
- Indra Tama, A. (2016). Pengaruh realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi terhadap tingkat pengangguran dengan belanja modal sebagai variabel moderasi. *Jurnal Riset Akuntansi dan*

Komputerisasi Akuntansi, 7(1), 1–10.

Indradi, D. (2018). Pengaruh likuiditas dan capital intensity terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 1(1), 147–167.

Laode, M., Engka, D. S., & Sumual, J. I. (2020). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(2), 58–67.

Lestari, T., Lestaluhu, N. H., & Manduapessy, R. L. (2024). Analisis faktor-faktor yang menentukan daya saing usaha industri mebel di Kota Timika. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (JEBI)*, 2(10), 1520–1536.

Mahroji, D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh jumlah penduduk, PDRB, dan IPM terhadap tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ekobis: Ekonomi, Bisnis & Manajemen*, 10(1), 48–57. <https://doi.org/10.37932/j.e.v10i1.84>

Mardiana, Militina, T., & Utary, A. R. (2018). Pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pengangguran dan kemiskinan. *Inovasi*, 13(1), 50–60. <https://doi.org/10.29264/jinv.v13i1.2437>

Mulia, R. A., & Saputra, N. (2020). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Kota Padang. *Jurnal El-Riyasah*, 11(1), 67–83. <https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>

Muqorrobin, M., & Soejoto, A. (2017). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 5(3), 1–6.

Muttaqiyatin, W. P., & Prakoso, B. S. E. (2017). Persepsi masyarakat terhadap rencana pembangunan smelter di Kawasan Industri Pomako Kabupaten Mimika. *Jurnal Bumi Indonesia*, 6(1), 1–8.

Novitasari, D. A. (2015). Analisis pola spasial dan autokorelasi spasial PDRB sektor industri di Jawa Timur. *Jurnal Ekbis*, 13(1), 1–9. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v13i1.113>

Nurkolis. (2015). Dampak keberadaan industri terhadap kondisi sosial ekonomi dan lingkungan masyarakat sekitar. Universitas Negeri Malang.

Palindangan, J., & Bakar, A. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan IPM terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis*, 5(1), 65–80.

Rahmadillah, R., & Rismatur, N. (2024). Retribusi daerah, DAU, dan DAK dalam Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi STIEP*, 9(1), 93–107. <https://doi.org/10.54526/jes.v9i1.277>

Roby, C. K. (2013). Pengaruh PDRB, UMK, dan inflasi terhadap tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang. Universitas Brawijaya.

Ronaldo, R. (2019). Pengaruh inflasi dan tingkat pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi*, 21(2), 137–153.

- Saragih, A. H. (2018). Pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia. *Jurnal Economia*, 14(2), 197–211. <https://doi.org/10.21831/economia.v14i2.21595>
- Sary, R. A., & Rochmatullah, M. R. (2023). The effect of local tax revenue and local retribution on the human development index. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5983–5994.
- Setiawati, K. E., Lamusa, A., & Laihi, M. A. A. (2023). Strategi pengembangan usaha abon ikan tuna. *Jurnal Pembangunan Agribisnis*, 2(2), 120–130. <https://doi.org/10.22487/jpa.v2i2.1769>
- Siahaan, L. M. (2019). Pengaruh aktivitas industri terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karo. *Ekonomikawan*, 19(1), 31–41. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v19i1.3079>
- Sutrisno, D. C. (2013). Pengaruh jumlah objek wisata, hotel, dan PDRB terhadap retribusi pariwisata. *Economics Development Analysis Journal*, 2(4), 435–445.
- Syaputro, L. W. (2022). Determinan Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Ecoplan*, 5(1), 20–28. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v5i1.344>